

**SKRIPSI**

**GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**

**PERWAKILAN DI DAERAH**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana*

*Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**EDI GUSTIA BAHRI**

**1310111066**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM TATA NEGARA (PK VI)**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

	No. Alumni Universitas	Edi Gustia Bahri	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/ Tanggal Lahir: Ujung Gading/12 Agustus 1994	f) Tanggal Lulus: 26 Juli 2018	g) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan
b) Nama Orang Tua: Syafwan Lubis dan Diana Satar Br Daulay	c) Fakultas: Hukum	h) IPK: 3,43	i) Lama Studi: 5 Tahun 1 Bulan
d) PK: Hukum Tata Negara (PK VI)	e) BP: 1310111066	j) Alamat: Jl. gotong Royong	Tampus Nagari Ujung Gading, Pasaman Barat.

**GAGASAN PEMBENTUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) PERWAKILAN DI DAERAH**

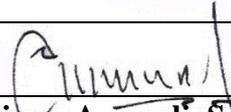
**(Edi Gustia Bahri, Nomor Bp. 1310111066 Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumlah Halaman: 78 Halaman, Tahun 2018)**

**ABSTRAK**

Tindak pidana korupsi di Indonesia semakin besar dan masif mengingat mewabahnya perilaku korupsi di berbagai lini penyelenggaraan negara di daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Keberadaan Kejaksaan dan Kepolisian di daerah dinilai masih belum efektif dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi di daerah. Gagasan mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah sebagaimana dimaksud sudah terbuka peluang manakala ditelisik dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, terkhusus Pasal 19 ayat (2) menyatakan bahwa KPK dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Perumusan masalah, bagaimana gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah ?. Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dan survei melalui angket/kuisisioner, data yang didapat diolah melalui proses *editing* dan dianalisis dengan metode kualitatif (tidak menggunakan angka-angka ataupun rumus matematika). Pandangan KPK sejalan dengan pandangan masyarakat tentang gagasan pembentukan KPK perwakilan di daerah yang menyatakan bahwa kehadiran KPK perwakilan sudah sangat penting di daerah menimbang efektifitas kinerja dari Kepolisian dan Kejaksaan di daerah melalui banyaknya aduan dari masyarakat yang menumpuk mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi di daerah dan jumlah penyidikan kasus dugaan tindak korupsi yang berbanding jauh dengan jumlah penuntutan yang sudah dilakukan. Pembentukan KPK perwakilan di daerah membutuhkan instrumen hukum tambahan guna memperkuat kedudukannya di daerah dengan mempertahankan sifat independensi dari KPK itu sendiri. Semua hal tersebut dapat diwujudkan melalui komitmen dari penyelenggara negara dalam melaksanakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap konsisten dengan semangat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan yang sudah dicita-citakan bersama serta peran masyarakat perlu dilibatkan dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 29 Juli 2018  
Abstrak telah disetujui oleh penguji

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	<b>Yunita Sofyan, S.H.,M.H.</b>	<b>Beni Kharisma Arrasuli, S.HI, LLM</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Tata Negara: **Arfiani, S.H.,M.H.**

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas
No. Alumni Fakultas:	Nama: Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama: Tanda Tangan: